

Penerapan Perda Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai

Nadya Aisyah Haqiiq

¹Ilmu Administrasi Publik, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

nadyaaisyahhaqiiq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai. apakah telah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Perhubungan dan masyarakat sebanyak 6 (enam) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Binjai sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena dari empat kategorisasi yang dijelaskan dua kategori sudah terlaksana yaitu adanya tujuan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir dan adanya program yang dijalankan dengan melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir. Sedangkan dua kategorisasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu adanya pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan para pengelola parkir yang tidak memakai atribut. Adanya target yang dicapai belum efektif dikarenakan retribusi parkir belum mencapai target karena kurangnya wilayah tempat perparkiran sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang harus ditingkatkan semaksimal mungkin.

Kata Kunci: *Retribusi Parkir.*

1. PENDAHULUAN

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dengan kata lain, agar adanya kejelasan secara pasti mengenai jumlah tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir secara keseluruhan melalui karcis yang telah dikeluarkan, sehingga adanya kejelasan terhadap pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Selain itu perda tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir di kota Binjai, agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dengan kata lain, agar adanya kejelasan secara pasti mengenai jumlah tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir secara keseluruhan melalui karcis yang telah dikeluarkan, sehingga adanya kejelasan terhadap pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Selain itu perda tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir di kota Binjai, agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

Melalui penetapan lokasi dan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, maka pemerintah daerah juga menetapkan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Besaran retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan untuk satu kali parkir. Terjadi penyesuaian besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang bertujuan untuk memberikan kontribusi penerimaan yang signifikan bagi retribusi parkir di tepi jalan umum. Penyesuaian tarif yang dilakukan juga berdasarkan ruang parkir yang disediakan dan perkembangan perekonomian di wilayah kota Binjai. Tarif harga parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir sangat berbeda dengan tarif harga parkir yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pasal 29 mengenai tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 3 sebesar Rp. 500,- kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp. 1.000,- mobil barang pick up sebesar Rp. 1.500,- mobil bus, truk, mobil tangki sebesar Rp. 2.000,-. Dimana dengan

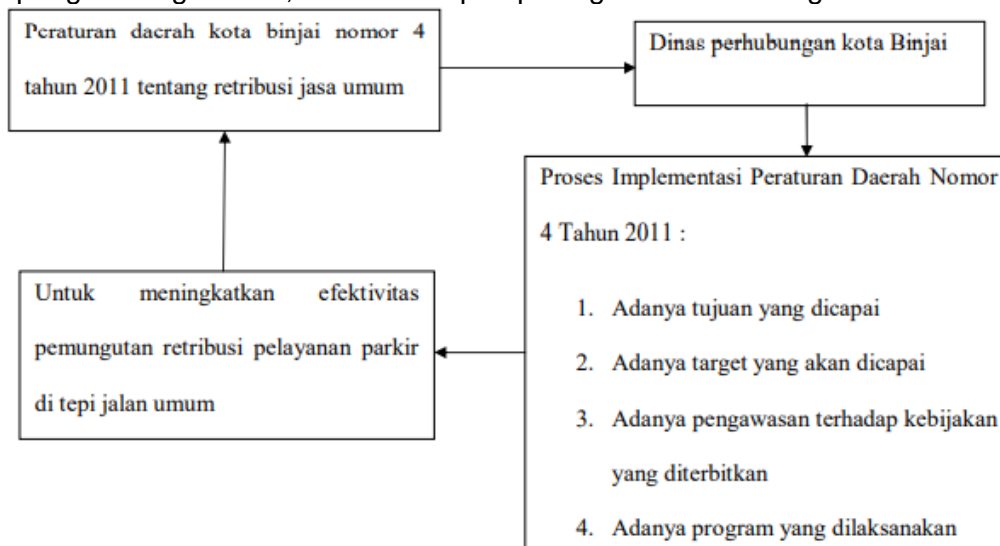
adanya penyesuaian tarif ini akan terjadi peningkatan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi penerimaan retribusi daerah secara umum.

Diperoleh bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. apabila dikelola dengan serius dan strategi yang tepat, maka penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi daerah secara khusus. Dengan adanya masalah yang di hadapi saat ini tentang efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan teknik dan jenis pengumpulan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis. Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konsep

3. HASIL

Deskripsi Hasil Wawancara

Adanya Tujuan Yang Dicapai

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan ibu Dra. Trisni Mulyani, M. Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai menyatakan bahwa dengan adanya tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah dapat dikatakan berhasil. Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan menambah tempat-tempat ataupun wilayah parkir agar iuran parkir yang diterima dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya hal tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelola parkir sehingga perlu diadakan pelatihan kepada pengelola parkir yang bertugas di tempat-tempat yang telah ditentukan, dengan adanya pelatihan dan mensosialisasi pentingnya tujuan dari retribusi pelayanan parkir akan berdampak baik pada PAD.

Menurut bapak Ardi Antono, ST selaku Kepala Badan Sarana dan Prasarana Kota Binjai menyatakan bahwa tujuan yang dicapai ya sudah dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Objek yang disediakan oleh pemerintah daerah mampu memenuhi tempat parkir sehingga para pengguna parkir bisa merasa nyaman. Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan tempat-tempat dengan kualitas keamanan dan ketertiban yang diharapkan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir. Namun masih banyak kendala yang didapat karena pengelola parkir memiliki SDM rendah dan kurangnya pengetahuan tentang pelayanan parkir, sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola parkir agar tidak ada penyalahgunaan atas uang yang telah dibayarkan untuk keperluan pribadi.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari bapak Khaidir selaku pengelola parkir menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sudah dijalankan dengan baik dan sudah mengetahui tujuan dari retribusi pelayanan parkir tersebut. Pelayanan parkir yang disediakan oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, itu dibuktikan dengan adanya sosialisasi, penyuluhan, serta tempat parkir yang layak dan terjaga ketertibannya. Uang yang dibayarkan masyarakat kepada pengelola parkir sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima sehingga masyarakat dengan senang hati membayarkan sebagian uangnya untuk parkir. Sedangkan menurut bapak Budi Susanto selaku pengelola tempat parkir, menyatakan bahwa tujuan yang dicapai masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Tempat parkir yang disediakan Dinas Perhubungan masih banyak memiliki hambatan diakibatkan karena tempat parkir yang sempit sehingga mengganggu pengguna jalan. Namun pelayanan yang diterima sudah sesuai, dikarenakan kendaraan yang diparkirkan dapat terjaga dengan baik sehingga para pengguna membayarkan iuran parkir tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka akan meningkatkan PAD.

Wawancara dengan bapak Irfandi selaku pengguna jasa parkir (masyarakat) menyatakan bahwa tujuan retribusi pelayanan parkir belum diketahui oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena Dinas Perhubungan kurang melakukan sosialisasi tentang retribusi parkir kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak

mengetahui tentang tujuan sebenarnya retribusi parkir tersebut. Pelayanan parkir yang diterima masyarakat sudah sesuai dengan keinginan, itu ditandakan dengan pengelola parkir yang memiliki sikap yang sopan serta menjaga kendaraan bermotor tanpa ada goresan sedikitpun sehingga iuran yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah tercapai. Itu dibuktikan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan parkir sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya retribusi parkir.

Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Dra. Trisni Mulyani, M. Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai. Dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan yaitu dengan bekerja sama dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam memaksimalkan pengawasan ke lapangan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan cara turun ke lapangan dan mengecek langsung setiap satu bulan sekali. Pengawasan yang diterbitkan masih perlu perbaikan ke petugas/pengelola parkir agar apa yang dilakukan mampu memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat dan yang terlibat dalam pengawasan tersebut. Sedangkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Ardi Antono, ST selaku Kepala Badan Sarana dan Prasarana. Dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik, itu dibuktikan dengan adanya pengawasan langsung ke lapangan serta melakukan pembinaan kepada pengelola parkir agar apa yang dilakukan tidak mengalami kesalahan dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan.

Pengawasan yang dilakukan harus bekerja sama dengan semua anggota yang bekerja di Dinas Perhubungan agar pengawasannya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Lain halnya dengan bapak Khaidir selaku pengelola parkir menyatakan bahwa pengawasan yang diberikan Dinas Perhubungan kepada pengelola parkir belum dijalankan dengan baik, dibuktikan dengan jarang/tidak rutin pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan. Pengawasan yang dilakukan Dishub belum sesuai dengan yang diharapkan karena pengelola parkir berharap ada perhatian dari dinas agar terus melakukan pengawasan perparkiran setiap satu bulan agar tercipta perparkiran yang tertib dan nyaman. Masyarakat juga terlibat di dalam pengawasan retribusi pelayanan parkir karena masyarakat juga sebagai pengguna jasa parkir.

Selain itu, menurut bapak Budi Susanto selaku pengelola tempat parkir, menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum semaksimal dengan apa yang diinginkan. Pengawasan dilakukan Dinas Perhubungan tidak rutin setiap bulannya sehingga sebagian dari pengelola parkir tidak memberikan karcis kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir dan tidak memperhatikan kendaraan yang parkir bahkan meninggalkan begitu saja tanpa pengawasan dari seorang pengelola atau petugas parkir. Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Irfandi selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa

pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan para pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis namun meminta uang parkir kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan dinas masih belum sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan belum berjalan dengan baik. Itu dibuktikan dengan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan yang turun langsung ke lapangan. Masyarakat berharap ada ketegasan yang dilakukan dinas untuk menertibkan dan memberikan kenyamanan kendaraan yang parkir di tepi jalan.

Adanya Program Yang Dilaksanakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan ibu Dra. Trisni Mulyani, M. Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum. Program tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum demi keselamatan kendaraan pengguna jalan. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya pelimpahan wewenang pembayaran retribusi parkir di tepi jalan di Dinas Perhubungan kota Binjai berupa tempat penyedia parkir dan wajib retribusi orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut bapak Ardi Antono, ST selaku Kepala Badan Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu menciptakan kembali tempat-tempat parkir yang semestinya diterapkan di tempat tempat yang telah ditentukan. Program yang dilakukan yaitu melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola parkir. program ini telah dilaksanakan setiap bulan dan diperiksa pada akhir tahun. Lain halnya dengan bapak Khaidir selaku pengelola parkir menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Binjai menciptakan kembali tempat tempat parkir. Program yang dijalankan dengan melakukan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya serta pelaksanaannya dilakukan dengan mengecek langsung. Program tersebut terlaksana dan dibuktikan dengan meningkatnya kendaraan bermotor yang parkir di tepi jalan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Irfandi selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum sudah dilakukan dengan adanya penyedia tempat parkir yang luas sehingga memudahkan pengguna untuk meletakkan kendaraannya sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan. Dengan adanya program tersebut membuat para wajib retribusi meningkatkan kesadarannya untuk membayarkan retribusi parkir, karena menurutnya program tersebut membuat dinas dan juga wajib retribusi saling membutuhkan satu sama lain demi menjaga keamanan, ketentraman, serta kenyamanan dalam proses penjagaan kendaraan bermotor.

Hal lain yang dinyatakan oleh bapak Mulyono selaku masyarakat menyatakan bahwa program yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah berjalan. Namun program tersebut belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dinas, hal itu dibuktikan dengan pengelola parkir yang tidak memberikan karcis kepada setiap

pengguna jasa parkir sehingga pengutipannya kurang maksimal. Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari banyaknya wajib retribusi yang membayar retribusi parkir dan menghidupkan kembali tempat parkir di tepi jalan. Pihak Dinas juga melakukan sosialisasi pembinaan kepada pengelola parkir serta pengawasan setiap bulannya

Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan ibu Dra. Trisni Mulyani, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target, dan sedikitnya konsumen yang membayar jasa parkir. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk pencapaian target dilakukan dengan penyusunan kembali lokasi tempat-tempat parkir dan memperbaiki fasilitas parkir. Adapun faktor penghambat di dalam retribusi pelayanan parkir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir, dan kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Sedangkan menurut bapak Ardi Antono, ST selaku Kepala Badan Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target yang diinginkan dan sedikitnya masyarakat yang memakai jasa parkir.

Dalam pencapaian target dilakukan dengan cara memperluas tempat parkir dengan memperbaiki fasilitas serta kenyamanan dalam perparkiran agar terwujud tempat parkir yang tertib. Faktor penghambat retribusi pelayanan parkir yaitu masih kurangnya masyarakat untuk membayar parkir, rendahnya SDM pengelola parkir dalam mengelola perparkiran, dan pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis kepada masyarakat. Sehingga Dinas Perhubungan perlu untuk melakukan pembinaan kepada pengelola parkir yang telah ditentukan.

Lain halnya dengan bapak Khaidir selaku pengelola parkir menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi pelayanan parkir belum mencapai target yang diinginkan, sarana tempat perparkiran kurang memadai, dan fasilitas yang minim. Peran masyarakat sangat berpengaruh karena retribusi merupakan iuran yang dikeluarkan masyarakat yang sudah menggunakan jasa parkir. Faktor penghambat target yaitu kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari Dinas Perhubungan. Selain itu, menurut bapak Budi Susanto selaku pengelola tempat parkir menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target, tempat perparkiran yang sempit, peran masyarakat sangat berpengaruh karena retribusi merupakan iuran yang dikeluarkan masyarakat yang sudah menggunakan jasa parkir. Faktor penghambatnya kurangnya fasilitas perparkiran yang disediakan oleh Dinas Perhubungan.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Mulyono selaku masyarakat menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk meningkatkan target belum berjalan dengan baik sehingga targetnya belum tercapai. Faktor penghambat yaitu kurangnya kenyamanan masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target, dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa parkir. Pihak dinas sudah melakukan perbaikan fasilitas tempat parkir dan menambah luas tempat perparkiran.

4. PEMBAHASAN

Adanya Tujuan Yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, dengan adanya tujuan yang dicapai, sudah dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir. Namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan parkir sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya retribusi parkir.

Retribusi parkir termasuk retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pencapaian peningkatan retribusi pelayanan parkir, yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari pendapatan retribusi parkir yang akan berdampak baik pada Pendapatan Asli Daerah. Namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan parkir sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya retribusi parkir.

Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan yang Diterbitkan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan belum berjalan dengan baik. Itu dibuktikan dengan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan yang turun langsung ke lapangan. Masyarakat berharap ada ketegasan yang dilakukan dinas untuk menertibkan dan memberikan kenyamanan kendaraan yang parkir di tepi jalan.

Oleh karena itu Dinas Perhubungan harus terus meningkatkan pengawasan ke lapangan agar pemungutan retribusi berjalan dengan efektif dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar parkir.

Adanya Program Yang Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, dengan adanya program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari banyaknya wajib retribusi yang membayar retribusi parkir. Pihak Dinas juga melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir serta pengawasan setiap bulannya sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan keuntungan kepada daerah itu sendiri. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangun daerah sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan

masyarakat. Adapun program kerja yang dilakukan Dinas Perhubungan yaitu dengan rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai \

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, dengan adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa parkir. adanya target yang harus dicapai merupakan salah satu tujuan utama dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi parkir dengan dilakukannya sosialisasi pembinaan untuk mengetahui keluhan pengguna jasa parkir tersebut, didalam mencapai target ini juga dibutuhkan pengawasan yang baik. Dimana target tersebut berupa banyaknya tempat penyedia parkir dan wajib retribusi orang pribadi atau badan.

Realisasi retribusi parkir di kota Binjai tidak pernah memenuhi target.hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 target yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Binjai yaitu sebesar Rp. 450.000.000, tetapi hanya menghasilkan realisasi sebesar Rp. 287.643.000. Sehingga realisasi yang dihasilkan pada tahun 2016 hanya mencapai angka 63,92%. Pada tahun 2017, retribusi parkir kota Binjai mengalami banyak peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan target sebesar Rp. 517.500.000 dan realisasi yang dicapai berjumlah Rp. 497.365.000 sehingga pada tahun 2017 retribusi parkir pemerintah kota Binjai mencapai angka 96,11% akan tetapi angka tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selain target dan realisasi yang berubah-ubah dari tahun 2016-2017 dan juga tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Penyebab lainnya adanya parkir liar yang dilakukan oleh petugas yang tidak terdaftar di dispenda yang berdampak pada penurunan hasil retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Adapun pengawasan yang dilakukan dengan melakukan monitoring kelapangan serta evaluasi terhadap pekerja masing-masing pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya. analisis kebijakan publik adalah proses mengevaluasi beberapa alternative kebijakan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternative terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan. Adanya target yang akan dicapai merupakan fokus utama dalam suatu kebijakan karena itu dibutuhkan alternatif-alternatif yang dilakukan Dinas untuk terus berusaha agar ditahun berikutnya target akan meningkat dari pada tahun sebelumnya. Dengan disediakannya fasilitas perparkiran yang baik orang akan membayar jasa parkir tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum). Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai, sudah terimplementasikan dengan baik.

Dibuktikan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir, kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir. Pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan para pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis namun meminta uang parkir kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan sudah dilakukan namun masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.

Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir serta pengawasan setiap bulannya, berupaya untuk meningkatkan pelayanan parkir. Target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang membayar jasa parkir, serta kurangnya tempat wilayah perparkiran yang ada di Kota Binjai. Hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah dalam hal mengenai retribusi parkir ialah meningkatkan pengawasan terhadap parkir liar, dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan dalam memenuhi masyarakat yang efektif.

REFERENSI

- Adhani, A., Anshori, A., & Mahardika, A. (2022). Public Attitudes towards the Government's Policy Communication in Preventing COVID-19. *Jurnal ASPIKOM*, 7(1), 61-70.
- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). *Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19)* (Vol. 1). umsu press.
- Agus, E., & Ali, K. (2022). Environmental Education for High School and Vocational School of Muhammadiyah City of Medan Based On Islam. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 930-937.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- ALI, K. (2018). *ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PERCONTOHAN YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Amrizal, D. (2017, October). The Development Model of Evaluation and Audit Internal Quality in University of Sumatera Utara. In *2nd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2017)* (pp. 103-107). Atlantis Press.
- Anshori, A., Sos, S., Kom, M. I., Mahardika, A., Sos, S., MAP, A. S. S. S., ... & Tanjung, Y. (2021). *Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan* (Vol. 1). umsu press.
- Bebestari, M., Hairani, P., Syafrida Hani, S. E., & Siregar, M. S. (2015). Pengarah: Walikota Medan Penanggung Jawab: Drs. Hasan Basri, MM (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan) Koordinator/Pimpinan Redaksi: Dra. Siti Mahrani Hasibuan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(2).
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.

- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH 2021* (Vol. 1). umsu press.
- Hajar, S., Ashary, F. H., Hermawan, A., Rani, N., Monika, I., & Stevani, F. (2021). Community Empowerment to Improve the Village Economy through the Utilization of Tea Leaves in Bahbutong Village, Simalungun Regency. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1004-1010.
- Hajar, S. (2022). Tourism Development Policy Through Economic Potential in Supporting Tourism and Creative Economy Programs in the Lake Toba Region. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 4(1), 18-30.
- Hajar, S., Supriyono, B., Muluk, M. K., & Said, A. (2021). Tourism Potential Planning Based Governance in the Lake Toba Area. *ITALIENISCH*, 11(2), 549-558.
- Hajar, S., Supriyono, B., Muluk, M. K., & Said, A. (2019). PLANNING DEVELOPMENT TOURISM IN ISLAMIC PERSPECTIVES AT LAKE TOBA REGION. *Journal of Islamic*, 4(24), 44-50.
- Hajar, S. (2019). Governance Tourism Village Based on Local Wisdom: In Islamic Perspective. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 4(24), 38-43.
- Hartanto, D., & Siregar, S. M. (2021). Determinants of overall public trust in local government: Meditation of government response to COVID-19 in Indonesian context. *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Hartanto, D., Hidayat, N., & Sazali, H. (2019, January). The Leadership of Head of the Medan City Police Department in Strengthening Community Systems. In *1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (pp. 205-209). Atlantis Press.
- Hartanto, D., Agussani, A., & Dalle, J. (2021). Antecedents of Public Trust in Government During the COVID-19 Pandemic in Indonesia: Mediation of Perceived Religious Values. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(4), 321-341.
- Hartanto, D. (2020). Hubungan Personal Mastery Dengan Kepemimpinan Pada Organisasi Bareskrim Polri. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 856-864.
- Hartanto, D. (2020). Analysis of mental models at criminal investigation division of the Indonesian National Police. *Technium Soc. Sci. J.*, 11, 612.
- Hartanto, D. Strategi Optimalisasi Sistem Pembinaan Penyidik Polri Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 12(1), 92-103.
- Izharsyah, J. R., & Lubis, F. H. (2020). Analysis of Masterplan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 2821-2834.
- Izharsyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, 4(2), 109-117.
- Izharsyah, J. R. (2022, February). Community Social Phenomenon as A Preventive Action and Disaster Mitigation of Longsor Disasters in Simalungun District. In *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE* (Vol. 1, p. 397). umsu press.
- Izharsyah, J. R., & Lubis, F. H. L. (2021). Government Strategies In Planning Mass Transportation Medan City. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(11), 1915-1932.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Khairiah, N. (2009). *HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP MODEL PENGKADERAN DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN PARTISIPASI*

- POLITIK PEREMPUAN DI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA MEDAN* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Kusnita, N., Wibowo, Y. S., Tanjung, I. S., & Nugroho, R. (2021). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Mendukung Potensi Bisnis Transportasi Laut Kepulauan Riau. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(6), 724-734.
- Martinelli, I. (2017). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 308-328.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Martinelli, I., & Khairiah, N. (2021). Teacher's Perspective on the Implementation of the Law on Teachers and Lecturers in Realizing Excellent Teacher Resources in Medan City. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 5902-5913.
- Martinelli, I., & Khairiah, N. (2021). Teacher's Perspective on the Implementation of the Law on Teachers and Lecturers in Realizing Excellent Teacher Resources in Medan City. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 5902-5913.
- Martinelli, I., & Khairiah, N. (2020). SOSIALISASI URGENSI AKREDITASI SEKOLAH BAGI MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN YANG UNGGUL. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 9(2), 60-67.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. Sosialisasi mutu lulusan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.
- MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR
- Mujahiddin, M., & Mahardika, A. (2018). Analisis Potensi Konflik antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Warta Dharmawangsa*, (55).
- Rabiah, S. (2018). Penanaman Nilai Karakter melalui Pembelajaran Sastra dalam Mata Kuliah Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi.
- Ramlan, R., Sihombing, E. N., & Fajriawati, F. (2020). The Urgency of Regional Regulation Bill of Serdang Bedagai Regency on Trading Business. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(3), 523-533.
- Ramlan, R., & Argawansyah, C. (2020). The Legal Protection of Fishermen Sales in Dealing for Fishery Results in Sibolga. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 1890-1901.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 3(2), 87-96.
- Rizky, R. N., Mahardika, A., & Saputra, A. (2021). PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI SARANA AKSESIBILITAS LAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 233-238.
- Saputra, A., & Ardiansyah, M. R. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) DI KOTA MEDAN. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1-9.
- Saputra, A., Mahardika, A., & Izharsyah, J. R. (2021). The Rationality of the Max Weber Bureaucracy Model in the Modrenization of the Public Services Bureaucracy of the Industrial Era 4.0 (Case Study of Medan City E-KTP Services). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 6677-6687.

- Saputra, A., Ali, K., & Hajar, S. (2021). Acceleration of Public Services Through the Program E-Village in Improving Village Government in Pematang Johar Village. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(2), 364-375.
- Saputra, A. Pertukaran Sosial antara Kemiskinan dan Kepentingan Politik. *ISU-ISU GLOBAL & KONTEMPORER*, 55.
- Saputra, A., Mahardika, A., & Izharsyah, J. R. (2021). The Rationality of the Max Weber Bureaucracy Model in the Modernization of the Public Services Bureaucracy of the Industrial Era 4.0 (Case Study of Medan City E-KTP Services). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 6677-6687.
- Sihombing, E. N., & Iqbal, M. (2020). REGISTRATION LEGALITY OF DEED OF ESTABLISHMENT THROUGH SYSTEM ADMINISTRATION OF ENTERPRISE (THE ANALYSIS OF MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATION NO. 17 OF 2018). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 525-540.
- Siregar, H. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Resiko Bisnis, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang Dan Kebijakan Dividen Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan.
- Syahputra, B. P., & Tanjung, I. S. (2019). Membangun Sinergi Pusat Karir dan Program Studi Melalui Program Tracer Study dan Pengembangan Karir Lulusan. *Proceeding Indonesian Career Center Network (ICCN) Summit 2019*, 1(1), 237-239.
- Syafrizal, S., & Calam, A. (2019). Local Wisdom: Eksistensi Dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Eksplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Syahputra, G., Calam, A., Nugroho, C., Faisal, F., & Syafrizal, S. (2021). PEMBUATAN WEBSITE STKIP AMAL BAKTI. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 43-48.
- Syafrizal, S. (2021). Local Wisdom and Social Dilemma Has Allergy Upon Worn Value, Proudly with Currently Values (Viewed from Social Anthropology Perspective for Orang Ocu). *Randwick International of Social Science Journal*, 2(3), 302-315.
- Syafrizal, S. (2021). Recovery Policy Models on Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Affected By Toll Road As A Solution To The Decrease Of Family Life Quality (Case study in the society of Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara). *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 2(2), 43-52.
- Tanjung, I. S., & Putri, S. P. (2022). Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 119-123.
- Tanjung, I. S., Tanjung, H., & Wibowo, Y. S. (2021). Development of Tourism Communication Model Based on Local Wisdom in Padangsidimpuan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 9877-9885.
- Tanjung, Y., Mujahiddin, M., & Martinelli, I. (2021). Implementation of Gender Responsive Policies in Higher Education: A Study at Three Universities in North Sumatra. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 5914-5926
- Yusri, M., & Amrizal, D. (2019, December). Political Education Through the Application of the Abstentions Countermeasure Model by KPUD (Regional Election Commission) Deli Serdang. In *4th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2019)* (pp. 650-654). Atlantis Press.
- Yusriati, Y., & Amrizal, D. (2020). Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. *Warta Dharmawangsa*, 14(3), 500-507.